EFEKTIVITAS PROGRAM PENGADAAN BIBIT TERNAK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PETERNAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MUHAMMAD GALVIN FAHREZA
33.0812
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email : galvinfhrz@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dwi Indah Kartika, S.Pd., M. Si.
Email dwi_indah@ipdn.ac.id

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): *Kutai Kartanegara Regency has substantial livestock potential, yet it has not fully contributed to farming community economic development due to limited farmer capital, restricted access to quality breeding stock, inadequate feed provision, and uneven technical and animal health support services.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the effectiveness of the livestock seed procurement program in supporting farming community economic development.* ***Method:*** *The research employs a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews, field observations, and document studies as data collection techniques, which are then analyzed through an interactive data analysis model.* ***Result:*** *The findings show that the livestock seed procurement program is generally categorized as moderately effective when viewed from the dimensions of production, efficiency, satisfaction, adaptiveness, and development, as reflected in the increase of livestock population, the growing number of beneficiary groups, and the rising contribution of the livestock sub-sector to the regional agricultural GDP. Key supporting factors include strong policy and budgetary commitment, the area's natural resource potential, and the existence of farmer group institutions, while inhibiting factors consist of feed constraints, limited numbers of extension officers and animal health workers, and perceived inequities in the inter-regional distribution of assistance.* ***Conclusion:*** *Strengthening substantive socialization, improving technology-based monitoring systems, expanding feed support, and enhancing farmer group institutional capacity are required to ensure that the program's impact on farming community economic development becomes more equitable and sustainable.*

Keywords: *Program Effectiveness; Livestock Seed Procurement; Economic Development; Farming Communities; Kutai Kartanegara*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi peternakan yang besar, namun belum berkontribusi secara maksimal terhadap pengembangan ekonomi masyarakat petani karena terbatasnya modal, sulitnya akses terhadap bibit ternak berkualitas, penyediaan pakan yang tidak memadai, serta tidak meratanya layanan dukungan teknis dan kesehatan hewan.**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pengadaan bibit ternak dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat petani. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis melalui model analisis data interaktif. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengadaan bibit ternak secara umum dikategorikan cukup efektif jika dilihat dari dimensi produksi, efisiensi, kepuasan, adaptabilitas, dan pengembangan. Hal ini tercermin dari peningkatan populasi ternak, bertambahnya jumlah kelompok penerima manfaat, dan meningkatnya kontribusi subsektor peternakan terhadap PDB pertanian daerah. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kebijakan dan anggaran yang kuat, potensi sumber daya alam wilayah, serta keberadaan kelembagaan kelompok tani. Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari kendala pakan, terbatasnya jumlah penyuluh dan tenaga kesehatan hewan, serta persepsi mengenai ketidakmerataan distribusi bantuan antarwilayah. **Kesimpulan :** Penguatan sosialisasi substantif, peningkatan sistem pemantauan berbasis teknologi, perluasan dukungan pakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani diperlukan untuk memastikan bahwa dampak program terhadap pengembangan ekonomi masyarakat petani menjadi lebih merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Program; Pengadaan Bibit Ternak; Pengembangan Ekonomi; Masyarakat Petani; Kutai Kartanegara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan karena berkontribusi terhadap penyediaan bahan pangan sumber protein hewani, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan (Subekti, 2008). Keberadaan subsektor peternakan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas produksi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pembangunan wilayah yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan peternakan rakyat menjadi salah satu pendekatan penting karena sebagian besar usaha ternak di daerah masih dijalankan oleh rumah tangga petani dengan skala usaha kecil dan bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor peternakan. Dengan

luas wilayah mencapai 27.263,10 km², Kukar memiliki ketersediaan sumber daya alam yang mendukung pengembangan usaha peternakan, seperti ketersediaan lahan, sumber pakan alami, serta karakteristik wilayah pedesaan yang masih memungkinkan pengembangan ternak berbasis masyarakat. Terlebih lagi, setelah sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai bagian dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, posisi strategis Kukar semakin meningkat. Kabupaten ini tidak hanya berperan sebagai wilayah administratif, tetapi juga memiliki fungsi penting sebagai daerah penyangga pangan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan IKN dan sekitarnya (Kukarpaper, 2026).

Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya mampu diwujudkan dalam bentuk kemandirian produksi peternakan daerah. Salah satu indikatornya terlihat dari kondisi pemenuhan kebutuhan daging sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih belum sepenuhnya berasal dari produksi lokal. Tingginya kebutuhan konsumsi daging sapi menyebabkan daerah masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, seperti Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (Eventnusantara, 2025). Ketergantungan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya peternakan yang tersedia dengan kemampuan produksi aktual masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas peternakan lokal agar mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan wilayah yang berkembang akibat pembangunan IKN.

Sebagai bentuk upaya meningkatkan kapasitas produksi peternakan rakyat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan Program Pengadaan Bibit Ternak yang diberikan kepada kelompok tani ternak sebagai penerima manfaat (Distanak Kukar, 2024). Program ini dirancang sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan aset produksi berupa ternak, dengan harapan dapat meningkatkan populasi ternak, memperkuat ekonomi rumah tangga peternak, serta mendorong kemandirian produksi daging sapi daerah.

Pelaksanaan program tersebut menunjukkan beberapa hasil yang positif. Berdasarkan data daerah, populasi sapi potong mengalami pertumbuhan sebesar 1,8% pada tahun 2023 dan sektor peternakan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Kartanegara (BPS Kukar, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui bantuan ternak memiliki peluang untuk memberikan dampak ekonomi dan mendukung pengembangan subsektor peternakan daerah.

Meskipun demikian, keberhasilan program bantuan ternak tidak hanya dapat dilihat dari peningkatan jumlah ternak atau indikator ekonomi semata. Dalam implementasinya, program masih menghadapi berbagai permasalahan struktural yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program. Usaha ternak rakyat masih menghadapi kendala berupa keterbatasan ketersediaan pakan terutama pada musim kemarau, rendahnya tingkat reproduksi ternak, keterbatasan pengetahuan teknis budidaya, serta kurang optimalnya pendampingan kepada kelompok penerima manfaat (Harsita dan Amam dalam Amam, 2022). Faktor-faktor tersebut

menyebabkan sebagian penerima bantuan belum mampu mengembangkan ternaknya secara optimal dan mempertahankan keberlanjutan usaha peternakan.

Selain kendala teknis, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. Program bantuan ternak yang berbasis kelompok membutuhkan kapasitas organisasi yang baik, mulai dari kemampuan administrasi kelompok, pengelolaan aset bantuan, koordinasi antaranggota, hingga kemampuan kelompok dalam mengembangkan usaha secara mandiri. Namun, kondisi kelompok tani ternak di lapangan menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antarwilayah, terutama antara kelompok yang berada dekat pusat pelayanan dengan kelompok di wilayah yang lebih terpencil. Ketimpangan kapasitas tersebut dapat memengaruhi tingkat keberhasilan penerima manfaat dalam mengelola bantuan yang diberikan.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas program adalah keterbatasan layanan pendukung, seperti jumlah tenaga medis hewan, akses pelayanan kesehatan ternak, dan distribusi bantuan yang belum sepenuhnya merata di seluruh kecamatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan kemampuan penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan produktivitas ternak menjadi berbeda-beda. Selain itu, distribusi bantuan yang belum menjangkau seluruh wilayah secara proporsional dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat serta berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan terhadap program pemerintah (Kutairaya, 2026).

Dengan demikian, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan program pengadaan bibit ternak belum cukup hanya dinilai berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan atau peningkatan populasi ternak, tetapi perlu dikaji dari aspek efektivitas pelaksanaannya secara lebih menyeluruh. Efektivitas program perlu dilihat dari kemampuan program dalam mencapai tujuan, mengelola sumber daya, memenuhi kebutuhan penerima manfaat, beradaptasi dengan kondisi lingkungan, serta menjamin keberlanjutan kelompok peternak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menganalisis efektivitas Program Pengadaan Bibit Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan aspek organisasi, kelembagaan, dan kondisi faktual di lapangan.

1.2 Kesenjangan Masalah (*Research Gap*)

Penelitian mengenai efektivitas program bantuan ternak telah banyak dilakukan, namun masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini. Secara empiris, sebagian besar penelitian terdahulu masih mengkaji efektivitas bantuan ternak secara parsial dengan fokus yang terbatas, seperti peningkatan pendapatan rumah tangga peternak, produktivitas komoditas tertentu, atau keberhasilan program pada tingkat kelompok penerima manfaat (Yanti et al., 2023). Pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana efektivitas program dipengaruhi oleh faktor yang lebih kompleks, seperti kapasitas kelembagaan kelompok, mekanisme pendampingan, ketepatan distribusi bantuan, serta perbedaan karakteristik wilayah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan berupa keterbatasan kajian yang mampu melihat efektivitas program bantuan ternak secara menyeluruh dalam konteks wilayah yang luas dan memiliki keragaman sosial-ekonomi seperti Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain kesenjangan empiris, terdapat pula kesenjangan konseptual dalam penerapan teori efektivitas organisasi. Penelitian ini menggunakan perspektif Gibson et al. (1997) yang menjelaskan efektivitas organisasi melalui lima dimensi utama, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan. Teori tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui pengelolaan sumber daya yang optimal serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Namun, sebagian penelitian terdahulu cenderung menggunakan indikator keberhasilan yang lebih sederhana dan belum banyak menguji bagaimana dimensi efektivitas organisasi tersebut berjalan dalam konteks program bantuan pemerintah yang melibatkan kelompok masyarakat dengan kapasitas yang beragam.

Dalam konteks program bantuan ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat kondisi empiris yang menunjukkan adanya jarak antara asumsi teoritis dengan praktik pelaksanaan program. Pada dimensi efisiensi, teori menekankan optimalisasi penggunaan sumber daya, tetapi implementasi di lapangan menghadapi kendala berupa keterbatasan pakan pada musim kemarau, akses layanan kesehatan hewan yang belum merata, serta keterbatasan tenaga pendamping. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan sumber daya program belum sepenuhnya mencapai tingkat efisiensi yang diharapkan.

Pada dimensi kepuasan, teori efektivitas organisasi menekankan bahwa keberhasilan program dapat dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya, keterbatasan anggaran menyebabkan distribusi bantuan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan kecemburuan sosial antarwilayah penerima maupun nonpenerima bantuan (Rahmansyah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kepuasan penerima manfaat tidak hanya dipengaruhi oleh manfaat ekonomi, tetapi juga oleh persepsi keadilan dalam tata kelola program.

Selanjutnya, pada dimensi pengembangan, teori efektivitas organisasi mengasumsikan bahwa organisasi mampu meningkatkan kapasitasnya secara berkelanjutan. Akan tetapi, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberlanjutan program bantuan ternak sering menghadapi hambatan berupa ketidakmerataan kemampuan manajerial, administrasi kelompok, serta lemahnya kapasitas kelembagaan peternak di wilayah terpencil (Andriati dalam Nursamsi et al., 2024). Hal tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan teori mengenai pengembangan organisasi dengan kondisi faktual kelompok penerima bantuan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis efektivitas program bantuan ternak tidak hanya dari aspek hasil ekonomi, tetapi juga melalui dimensi organisasi yang mencakup efisiensi, kepuasan, kemampuan adaptasi, dan keberlanjutan pengembangan kelompok. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program bantuan ternak dalam konteks wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai efektivitas bantuan ternak dan pemberdayaan peternak telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Penelitian M. Juni Andhika Rezani (2022) mengkaji efektivitas bantuan ternak kambing yang diberikan pemerintah di Desa Tanjung Putus dengan melihat sejauh mana program tersebut mampu mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, penelitian Citra Nur Wahyunita dan Faruq Ahmad Futaqi (2022) membahas mekanisme pelaksanaan program kambing bergulir dengan skema berbasis zakat di UPZIS NU Care LAZISNU Mrican, yang menitikberatkan pada aspek pengelolaan program dan kebermanfaatannya bagi penerima bantuan. Selain itu, penelitian Dwi Yuzaria dan Ismet Iskandar (2016) menganalisis dampak kebijakan bantuan ternak sapi potong terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan ekonomi di wilayah Sawahlunto.

Kajian lainnya dilakukan oleh Putra Suardika, I G. A. A. Ambarawati, dan I Made Sudarma (2015) yang berfokus pada efektivitas pola kemitraan komersial sapi potong, serta penelitian Devi Yanti, Asdi Agustar, dan Rusda Khairati (2023) yang mengkaji kontribusi usaha peternakan dalam penyerapan tenaga kerja keluarga sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan (Suardika et al., 2015; Yanti et al., 2023). Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa program bantuan ternak memiliki potensi dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Namun, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan dalam melihat efektivitas program bantuan ternak secara komprehensif. Sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan yang bersifat parsial dengan fokus pada satu jenis komoditas tertentu, seperti kambing atau sapi potong, serta lebih banyak menilai keberhasilan program berdasarkan indikator ekonomi rumah tangga atau peningkatan produksi secara langsung. Pendekatan tersebut belum banyak mengkaji keterkaitan antara aspek kelembagaan kelompok, kapasitas penerima manfaat, distribusi program, kualitas pendampingan, serta kemampuan program dalam beradaptasi terhadap karakteristik wilayah. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak melihat efektivitas bantuan ternak dalam konteks pembangunan daerah secara lebih luas, seperti kontribusinya terhadap penguatan sektor peternakan daerah, pemenuhan kebutuhan pangan, dan dukungan terhadap indikator ekonomi makro seperti PDRB. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas Program Pengadaan Bibit Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang lebih menyeluruh.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah (*Novelty*)

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu baik dari aspek teori, metode analisis, karakteristik objek penelitian, maupun konteks kebijakan yang dikaji. Perbedaan pertama terlihat dibandingkan dengan penelitian M. Juni Andhika Rezani (2022) yang berfokus pada efektivitas bantuan ternak kambing di Desa Tanjung Putus. Penelitian tersebut memiliki karakteristik objek penelitian yang bersifat mikro dengan cakupan satu desa dan satu jenis komoditas ternak, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan

wilayah yang lebih luas yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan karakteristik wilayah yang beragam. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan bantuan dari aspek kebermanfaatan langsung bagi penerima, tetapi menggunakan perspektif Teori Efektivitas Organisasi Gibson et al. (1997) melalui dimensi produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan untuk melihat efektivitas program secara lebih menyeluruh.

Selanjutnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian Citra Nur Wahyunita dan Faruq Ahmad Futaqi (2022) yang mengkaji program kambing bergulir berbasis zakat di UPZIS NU Care LAZISNU Mrican. Perbedaan utama terletak pada pendekatan kebijakan dan sumber program yang dianalisis. Penelitian terdahulu tersebut menitikberatkan pada mekanisme pengelolaan dana sosial keagamaan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini mengkaji program bantuan ternak sebagai intervensi kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor peternakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat proses distribusi bantuan, tetapi juga menghubungkan efektivitas program dengan kapasitas kelembagaan kelompok tani, keberlanjutan usaha ternak, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Perbedaan berikutnya dibandingkan dengan penelitian Dwi Yuzaria dan Ismet Iskandar (2016) terletak pada ruang lingkup objek dan pendekatan analisis. Penelitian tersebut menganalisis dampak kebijakan bantuan ternak sapi potong terhadap kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di wilayah Sawahlunto dengan fokus pada satu komoditas utama, yaitu sapi potong. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan multi-komoditas yang mencakup sapi Bali, kambing Peranakan Etawa (PE), babi, serta ayam ras/buras dalam satu wilayah administratif kabupaten. Selain mengukur dampak ekonomi masyarakat, penelitian ini juga memasukkan aspek tata kelola program, distribusi geografis bantuan, dan kemampuan kelompok penerima manfaat dalam mengelola bantuan sebagai bagian dari evaluasi efektivitas.

Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan kajian Putra Suardika, I G. A. A. Ambarawati, dan I Made Sudarma (2015) yang berfokus pada efektivitas pola kemitraan komersial sapi potong. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada hubungan kemitraan antara pelaku usaha dalam aspek ekonomi produksi, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas program pemerintah berbasis kelompok masyarakat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini melihat keberhasilan program bukan hanya dari aspek keuntungan atau produktivitas usaha, tetapi juga dari kemampuan organisasi kelompok dalam menjalankan fungsi pengelolaan, adaptasi terhadap kondisi lingkungan, serta keberlanjutan program setelah bantuan diberikan.

Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian Devi Yanti, Asdi Agustar, dan Rusda Khairati (2023) yang mengkaji dampak langsung usaha peternakan terhadap penyerapan tenaga kerja keluarga sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Penelitian tersebut lebih menekankan pada manfaat ekonomi rumah tangga peternak, sedangkan penelitian ini memperluas analisis dengan menghubungkan aspek ekonomi mikro tersebut dengan dimensi kelembagaan kelompok dan pembangunan ekonomi wilayah melalui kontribusi subsektor peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan

pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya melihat efektivitas bantuan ternak sebagai bagian dari sistem pembangunan daerah, bukan hanya sebagai program peningkatan pendapatan individu.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluasi efektivitas organisasi dalam menganalisis program bantuan ternak pemerintah daerah pada skala kabupaten dengan karakteristik wilayah yang kompleks. Penelitian ini dilakukan dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sehingga aspek efektivitas program tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan penerima manfaat, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan kemandirian produksi peternakan dan mengurangi ketergantungan pasokan ternak dari luar daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan mengintegrasikan aspek kelembagaan, ekonomi regional, distribusi bantuan, dan konteks kebijakan pembangunan wilayah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pengadaan bibit ternak dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat petani.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu metode yang meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci untuk memperoleh pemahaman mendalam secara induktif (Sugiyono, 2020). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya menggambarkan fenomena secara umum, melainkan memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai proses, pelaksanaan, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program pengadaan bibit ternak dalam pembangunan ekonomi masyarakat peternak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mampu mengurai kompleksitas hambatan yang dialami di lapangan secara alamiah, seperti masalah ketersediaan pakan di musim kemarau, keterbatasan tenaga medis hewan, hingga persoalan adaptasi ternak bantuan dan distribusi yang belum merata (Amam, 2022). Oleh karena itu, pendekatan deskriptif kualitatif dinilai paling tepat untuk menangkap fenomena riil di lapangan secara utuh yang tidak dapat direpresentasikan jika hanya bertumpu pada data numerik.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi (Sugiyono, 2016). Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman langsung, serta keterlibatan nyata dengan objek penelitian (Sugiyono, 2016). Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri dari Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai informan kunci karena memegang fungsi utama penyusunan kebijakan teknis dan pengambil keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan program pengadaan bibit ternak di daerah. Selain

itu, informan lainnya melibatkan 1 orang Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku penanggung jawab teknis verifikasi dan pemantauan lapangan, 2 orang Ketua Kelompok Tani Ternak penerima program sebagai representasi kelembagaan peternak di tingkat desa, serta 2 orang peternak anggota kelompok penerima manfaat (baik yang menggunakan kandang komunal maupun individu) sebagai subjek utama pengelola bantuan. Kombinasi seluruh informan ini dipilih secara sengaja untuk menghasilkan gambaran informasi yang utuh dan berimbang dari sudut pandang penyelenggara kebijakan, pelaksana teknis pembinaan, hingga peternak rakyat itu sendiri sebagai penerima manfaat.

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui teknik triangulasi (gabungan) yang memadukan berbagai pendekatan pengumpulan dan sumber data untuk menjamin validitas hasil studi (Sugiyono, 2016). Kredibilitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dan data hasil wawancara antara pihak aparatur Dinas Pertanian dan Peternakan, ketua kelompok tani ternak, dan peternak penerima bantuan. Selain itu, diterapkan pula triangulasi teknik yang membandingkan kesesuaian antara hasil wawancara mendalam dengan temuan observasi langsung di kandang serta dokumen resmi berupa laporan kegiatan dan statistik daerah, sehingga seluruh proses penarikan kesimpulan bersifat objektif, tepercaya, dan dapat meminimalisasi bias subjektif (Sugiyono, 2016).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas mengikuti model analisis kualitatif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Pada tahap reduksi, data mentah hasil wawancara mendalam dan catatan lapangan dikelompokkan, dirangkum, serta difokuskan pada poin-poin utama yang relevan dengan capaian program bantuan bibit. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dan matriks analisis agar benang merah fenomena di lapangan mudah dipahami (Miles & Huberman, 2014). Hasil analisis tersebut kemudian dikaji secara mendalam menggunakan pisau analisis teori Efektivitas Organisasi dari Gibson et al. (1997) yang membedah lima dimensi utama: dimensi produksi (peningkatan *output* populasi dan distribusi bibit), dimensi efisiensi (optimalisasi sumber daya sarana dan kesesuaian pakan), dimensi kepuasan (penilaian peternak terhadap kualitas bibit dan proses program), dimensi keadaptasian (fleksibilitas penyesuaian jenis ternak terhadap iklim dan kondisi lokal), serta dimensi pengembangan (peningkatan kapasitas teknis peternak dan penguatan kelembagaan kelompok) (Gibson et al., 1997).

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, secara khusus berfokus pada Dinas Pertanian dan Peternakan serta kelompok-kelompok tani ternak yang tersebar di beberapa kecamatan yang merupakan wilayah potensial penyangga lumbung pangan IKN Nusantara. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada bulan Januari 2026, yang mencakup tahapan observasi awal ke lokasi kandang, pelaksanaan wawancara mendalam bersama aparatur dinas dan peternak, hingga pengumpulan dokumen arsip pendukung ketahanan ekonomi daerah. Dengan rentang waktu pelaksanaan tersebut, penelitian ini mampu menyajikan potret yang aktual dan kontekstual

mengenai dinamika tata kelola peternakan lokal serta efektivitas program pengadaan bibit ternak yang tengah berjalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas program pengadaan bibit ternak dalam pembangunan ekonomi masyarakat peternak di Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan teori efektivitas organisasi dari Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1997). Teori ini menilai bahwa suatu proses efektivitas dapat diukur melalui lima dimensi pokok, yaitu dimensi produksi (*production*), dimensi efisiensi (*efficiency*), dimensi kepuasan (*satisfaction*), dimensi keadaptasian (*adaptability*), dan dimensi pengembangan (*development*). Adapun pembahasan hasil penelitian di lapangan dijabarkan secara mendalam pada subbab-subbab berikut.

3.1 Dimensi Produksi (*Production*)

Dimensi produksi dalam teori Gibson et al. (1997) berfokus pada kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan mutu *output* yang sesuai dengan permintaan dan tuntutan lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Kutai Kartanegara, dimensi produksi dari program pengadaan bibit ternak diukur melalui perluasan jumlah kelompok tani ternak penerima bantuan, jumlah ekor bibit yang disalurkan per tahun, pertambahan populasi ternak secara makro, serta kontribusi subsektor peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, capaian dimensi produksi ini dikategorikan cukup efektif karena program berhasil memperluas jumlah kelompok kepesertaan dan memicu tren kenaikan populasi ternak di tingkat kabupaten. Secara riil, tambahan bibit ternak ini terbukti menyentuh ekonomi sehari-hari rumah tangga peternak melalui kelahiran pedet yang menjadi aset finansial langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam sesi wawancara:

"Tujuan makro kita dari dinas adalah mendorong peningkatan populasi ternak rakyat secara berkelanjutan guna mewujudkan Kutai Kartanegara sebagai lumbung pangan penyangga IKN. Bantuan bibit ini ditargetkan untuk menambah aset produktif peternak di pedesaan."

Namun demikian, capaian produksi yang ideal secara makro ini belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi di tingkat mikro lapangan secara merata. Meskipun populasi kabupaten meningkat, beberapa peternak di wilayah pelosok masih mengalami kendala dalam mengoptimalkan laju kelahiran ternak akibat keterbatasan pakan dan hambatan teknis harian. Keberadaan bantuan bibit secara administratif memang memperluas basis kepesertaan, namun dampak ekonomi produksi berskala besar baru dapat dirasakan secara parsial oleh kelompok yang memiliki kedekatan jangkauan dengan layanan fasilitas teknis.

3.2 Dimensi Efisiensi (*Efficiency*)

Dimensi efisiensi mengkaji perbandingan antara *input* dan *output*, yang dalam konteks ini diukur dari kesesuaian jumlah bibit dengan kapasitas kandang dan ketersediaan pakan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sarana pendukung program. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan sarana berupa kandang komunal (kelompok) guna mempermudah manajemen pemeliharaan terpadu.

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya dinamika pemanfaatan fasilitas fisik yang memengaruhi efisiensi investasi program. Pada beberapa lokasi, ditemukan fenomena di mana kandang kelompok yang telah dibangun justru berakhir kosong karena peternak memilih memindahkan ternak bantuan ke pekarangan rumah masing-masing. Hal ini terungkap dari wawancara dengan salah satu peternak anggota kelompok penerima manfaat di lapangan:

"Di awal program kandang kelompok sempat dipakai, tapi lama-lama banyak yang bawa pulang sapinya ke rumah masing-masing karena merasa lebih dekat dan mudah dipantau. Kandang kelompok jadinya sering kosong."

Dari aspek observasi lapangan, terlihat bahwa efisiensi pemanfaatan sarana pendukung sangat bergantung pada komitmen kelembagaan kolektif kelompok. Pilihan untuk memindahkan sapi ke kandang individu dilakukan karena peternak merasa lebih aman dan fleksibel dalam memantau kondisi ternak harian. Akibatnya, terjadi pemborosan investasi sarana fisik kandang komunal yang tidak termanfaatkan optimal (*idle asset*), sehingga efisiensi penyerapan anggaran fasilitas pendukung belum mencerminkan keberhasilan tata kelola yang terintegrasi secara utuh.

3.3 Dimensi Kepuasan (*Satisfaction*)

Dimensi kepuasan mengukur sejauh mana organisasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, yang diindikasikan oleh persepsi para peternak terhadap kualitas bibit ternak yang diterima, keadilan proses distribusi, serta responsivitas layanan kesehatan hewan pasca-penyaluran. Kepuasan peternak merupakan indikator penting karena memengaruhi motivasi mereka dalam merawat aset bantuan.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan polarisasi persepsi peternak. Di satu sisi, peternak merasa sangat puas karena kualitas fisik bibit yang disalurkan (seperti jenis Sapi Bali) dinilai unggul, adaptif, dan berfungsi efektif sebagai tabungan hidup (*living savings*) keluarga untuk kebutuhan darurat. Namun, ketidakpuasan muncul pada aspek pelayanan pendukung, khususnya kelambatan penanganan medis medik veteriner saat ternak terserang penyakit serta adanya persepsi ketidakmerataan distribusi bantuan antarkecamatan. Hal ini digambarkan dari keluhan peternak dalam catatan lapangan:

"Kami bersyukur dapat sapi bantuan ini karena bisa jadi tabungan masa depan anak. Tapi kalau sapinya mendadak sakit, kami bingung karena petugas kesehatan hewan sangat jarang datang ke pelosok desa, dan kalau beli obat sendiri biayanya mahal."

Kesenjangan ini membuktikan bahwa meskipun kepuasan terhadap komoditas fisik bibit telah tercapai dengan baik, kepuasan terhadap pelayanan

pasca-distribusi (*after-sales service*) masih rendah. Keterbatasan respons layanan medis di wilayah terpencil mengurangi rasa aman peternak, sehingga dimensi kepuasan secara menyeluruh belum tercapai secara optimal.

3.4 Dimensi Keadaptasian (*Adaptability*)

Dimensi keadaptasian mengukur fleksibilitas program dan kemampuan tanggap organisasi dalam merespons dinamika perubahan lingkungan internal maupun eksternal, seperti fluktuasi iklim, krisis pakan di musim kemarau, dan penyesuaian regulasi kelompok. Program yang adaptif tercermin dari pemilihan komoditas bibit yang selaras dengan daya dukung agroekosistem lokal.

Hasil analisis lapangan menunjukkan adanya tingkat keadaptasian yang cukup baik pada tataran kultural kelompok tani ternak. Untuk meminimalkan risiko kegagalan, Dinas Pertanian dan Peternakan secara adaptif memilih jenis sapi Bali yang secara historis memiliki daya tahan tinggi terhadap lingkungan lokal. Selain itu, bentuk keadaptasian kelembagaan ditunjukkan oleh kemampuan pengurus kelompok dalam merumuskan aturan internal berupa sanksi sosial bagi anggota yang lalai. Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Ketua Kelompok Tani Ternak dalam sesi wawancara:

“Kalau ada anggota yang menelantarkan sapi bantuan, misalnya tidak memberi pakan cukup atau membiarkan sapi terus terikat tanpa perawatan, kelompok akan menegur secara lisan dan dapat mengambil alih sementara pemeliharaan sapi tersebut agar aset tidak hilang atau mati.”

Langkah antisipatif ini mencerminkan fleksibilitas penegakan disiplin berbasis komunitas untuk melindungi aset program. Namun, pada aspek teknis eksternal, keadaptasian peternak terhadap kendala musiman seperti kemarau panjang masih lemah. Ketergantungan yang tinggi pada rumput alam tanpa penguasaan teknologi pengawetan pakan membuat peternak rentan mengalami penurunan berat badan ternak saat musim kering tiba.

3.5 Dimensi Pengembangan (*Development*)

Dimensi pengembangan berkaitan dengan kapasitas program untuk memperkuat eksistensi kelembagaan, meningkatkan keterampilan teknis peternak secara berkelanjutan, dan menjamin keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Dimensi ini dinilai cukup berkembang namun masih membentur batasan struktural yang signifikan.

Di lapangan, penguatan modal sosial dan kelembagaan kelompok tani ternak tumbuh dengan baik melalui aktivitas koordinasi antaranggota. Namun, proses pengembangan kapasitas kognitif peternak secara mandiri dalam hal penanganan penyakit dini dan pengolahan pakan alternatif terhambat oleh keterbatasan ruang fiskal anggaran daerah serta keterbatasan kuantitas penyuluh. Hal ini dikonfirmasi oleh Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lampiran data:

"Kami terus mengupayakan pendampingan kelompok, namun rasio jumlah petugas lapangan kami sangat terbatas dibandingkan luasnya wilayah binaan di Kukar. Oleh karena itu, kemandirian kelompok dalam mendeteksi dini kesehatan hewan menjadi sangat krusial."

Pembatas struktural berupa minimnya intensitas bimbingan teknis tatap muka ini menyebabkan roda pengembangan kemandirian berjalan lambat. Ketika dimensi produksi menunjukkan hasil positif, keterbatasan transfer ilmu pengetahuan secara intensif membuat peternak tetap berada pada pola pemeliharaan tradisional yang bergantung pada intervensi eksternal dinas, sehingga keberlanjutan pengembangan jangka panjang belum berjalan optimal.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil analisis lapangan berdasarkan lima dimensi Teori Efektivitas Organisasi Gibson et al. (1997) menunjukkan bahwa efektivitas Program Pengadaan Bibit Ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bantuan fisik berupa ternak, tetapi dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara kapasitas peternak, dukungan kelembagaan, pelayanan pendukung, serta kemampuan kelompok dalam mengelola aset program. Untuk memposisikan kedudukan dan signifikansi penelitian ini secara akademis, temuan lapangan tersebut perlu didialogkan secara kritis dengan hasil penelitian terdahulu. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan antara asumsi teoritis, praktik implementasi program, serta karakteristik objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa temuan penting yang membedakan sekaligus memperkuat posisi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya.

Pertama, berkaitan dengan dimensi efisiensi dan adaptasi dalam pengelolaan bantuan ternak. Berbeda dengan temuan penelitian Kartika (2022) yang menyimpulkan bahwa hambatan utama program bantuan peternakan pedesaan berasal dari rendahnya penerimaan atau resistensi peternak terhadap jenis komoditas baru yang diberikan pemerintah, temuan penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kondisi yang berbeda. Pada lokasi penelitian ini, peternak justru menunjukkan tingkat penerimaan dan antusiasme yang tinggi terhadap komoditas bantuan, khususnya sapi Bali yang dinilai sesuai dengan karakteristik lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Hambatan utama bukan berasal dari penolakan terhadap bantuan, melainkan muncul pada tahap pengelolaan setelah bantuan diterima, yaitu keterbatasan manajemen pakan musiman, kemampuan pemeliharaan individu yang belum merata, serta kesulitan dalam menjaga produktivitas ternak secara berkelanjutan. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya karena menunjukkan bahwa efektivitas bantuan ternak tidak selalu dipengaruhi oleh faktor penerimaan masyarakat terhadap program, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas internal penerima manfaat dalam mengelola sumber daya yang diberikan.

Kedua, terkait dimensi produksi dan dukungan lingkungan organisasi, penelitian ini memperkuat temuan Rahmawati dan Akhsan (2023) mengenai pentingnya integrasi ekosistem pelayanan publik dalam keberhasilan program peternakan. Temuan penelitian di Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa penyediaan bibit ternak sebagai intervensi pemerintah tidak dapat berjalan secara optimal apabila berdiri sendiri tanpa dukungan aktor pendukung lainnya. Produktivitas ternak sangat bergantung pada keberadaan pelayanan kesehatan hewan, khususnya peran petugas medik veteriner yang mampu memberikan layanan secara berkala dan menjangkau lokasi kelompok peternak. Perbedaan

karakteristik wilayah menjadi faktor penting yang membedakan penelitian ini dengan kajian sebelumnya, karena luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menyebabkan akses pelayanan teknis menjadi tantangan tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas program bantuan ternak bukan hanya persoalan distribusi aset, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam membangun jaringan pelayanan publik yang mendukung keberlanjutan program.

Ketiga, terkait dimensi pengembangan organisasi dan kelembagaan kelompok tani, penelitian ini memperkuat temuan Naufal et al. (2023) yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan kelompok penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani ternak tidak hanya berfungsi sebagai penerima administratif program, tetapi juga menjadi aktor utama yang menjaga keberlangsungan aset bantuan. Peran aktif pengurus kelompok melalui mekanisme kontrol sosial, pengawasan pemeliharaan, serta penerapan aturan internal seperti pengambilalihan aset ketika terjadi kelalaian anggota terbukti menjadi bentuk tata kelola informal (informal governance) yang mampu mengurangi risiko kegagalan program. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan dengan pendekatan program bantuan yang sering kali memandang kelompok hanya sebagai wadah distribusi bantuan, sedangkan pada konteks Kutai Kartanegara kelompok justru menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Keempat, terkait dimensi efisiensi organisasi dan pemanfaatan sumber daya, penelitian ini menemukan kondisi yang berbeda dengan asumsi umum bahwa peningkatan anggaran dan penyediaan infrastruktur pendukung secara otomatis akan meningkatkan efektivitas program. Temuan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas fisik seperti kandang komunal tidak selalu berbanding lurus dengan optimalisasi pemanfaatannya. Beberapa fasilitas mengalami kondisi kurang aktif (idle asset) karena adanya perubahan preferensi peternak yang lebih memilih pola kandang individu yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perilaku pengguna, karakteristik sosial peternak, serta kesesuaian desain program dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut memberikan perspektif baru dalam kajian efektivitas bantuan ternak karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara perencanaan program secara administratif dengan realitas penggunaan di tingkat penerima manfaat.

Kelima, penelitian ini juga menemukan bahwa konteks kebijakan dan karakteristik wilayah memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas program bantuan ternak. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya melihat bantuan ternak sebagai program pemberdayaan dalam lingkup lokal dan terbatas, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kondisi tersebut membuat efektivitas program tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan penerima bantuan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam memperkuat produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan ternak dari luar daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan Teori Efektivitas Organisasi Gibson et al. (1997) dengan

menunjukkan bahwa keberhasilan program publik pada sektor peternakan dipengaruhi oleh hubungan antara faktor internal organisasi, kapasitas masyarakat, serta tekanan lingkungan eksternal yang lebih luas.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas program pengadaan bibit ternak dalam pembangunan ekonomi masyarakat peternak di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa hambatan struktural yang menyebabkan pelaksanaan program belum mencapai kondisi optimal. Keberhasilan program terlihat dari terpenuhinya dimensi produksi melalui peningkatan populasi ternak serta meningkatnya kepemilikan aset produktif sebagai bentuk tabungan hidup masyarakat peternak. Namun, efektivitas program masih menghadapi kendala pada dimensi efisiensi, kepuasan, dan pengembangan, terutama terkait pengelolaan pakan musiman, keterbatasan pelayanan kesehatan hewan, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pendukung seperti kandang komunal. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keputusan peternak untuk menggunakan kandang individu dibandingkan kandang komunal dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan, kemudahan pengawasan, dan kesesuaian dengan pola pemeliharaan masyarakat setempat.

Guna meningkatkan efektivitas program pengadaan bibit ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wilayah penyangga pangan IKN Nusantara, disarankan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperkuat sistem pelayanan pendukung melalui optimalisasi jangkauan medik veteriner secara mobile dan berkala hingga tingkat desa. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas peternak melalui pendampingan teknologi pengolahan pakan, khususnya penerapan pakan awetan untuk menghadapi keterbatasan hijauan pada musim kemarau. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok tani ternak perlu dilakukan melalui pengembangan sistem lumbung pakan mandiri dan kolaborasi antara pemerintah, kelompok peternak, serta pihak pendukung lainnya agar keberlanjutan usaha ternak dapat lebih terjamin.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu pengumpulan data dan ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada kelompok tani ternak tertentu di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pendekatan studi kasus. Kondisi tersebut menyebabkan temuan penelitian sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah penelitian, baik dari aspek sosial masyarakat, kelembagaan kelompok, maupun kondisi agroekosistem setempat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini masih memerlukan penyesuaian apabila diterapkan pada wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda, terutama daerah yang tidak memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga pangan IKN Nusantara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih merupakan kajian awal dalam melihat efektivitas program bantuan ternak berbasis kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Penelitian selanjutnya juga dapat diarahkan pada kajian mengenai efektivitas rantai pasok (supply chain) peternakan dari aspek produksi hingga pemasaran, kesiapan ekosistem logistik pangan daerah, serta kemampuan subsektor peternakan dalam memenuhi peningkatan permintaan pangan akibat perkembangan kawasan IKN Nusantara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya (khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan), para penyuluh lapangan peternakan di wilayah binaan, para pengurus Ketua Kelompok Tani Ternak, serta seluruh masyarakat peternak penerima manfaat program di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan keterbukaan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah tulus membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini dari awal hingga akhir.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andriati. (2024). Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok peternak dalam program bantuan ternak. Dalam Nursamsi, A. dkk. (Ed.), Dinamika kelembagaan peternakan rakyat di Indonesia (hlm. 45–62). Jakarta: Penerbit IPB Press.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik (Cetakan ke-4). Bandung: Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). New York: Pearson Education.

Ardiansyah, B. K., & Ma'rifah, A. (2020). Pemberdayaan peternak sapi perah di Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 5(2), 103–125. Diakses dari https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JPDPP/article/view/1292

Kuntjorowati, E., Andari, S., Prayoga, R. A., Yusuf, H., Soegiharto, S., Fatimah, S., Listyawati, A., Yuniarti, L., Suryani, & Hakim, F. N. (2024). Effectiveness of strengthening social protection and security programs in alleviating poverty in rural areas through multi-sector partnerships. Heliyon, 10(23), e40485. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40485

Perceka, A. L. (2018). Analisis komparatif angka kemiskinan sebagai dampak kebijakan program pemberdayaan ekonomi keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4(2), 165–169. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.10

Baltenweck, I., Cherney, D., Duncan, A., Eldermire, E., Lwoga, E. T., Labarta, R., Rao, E. J. O., Staal, S., & Teufel, N. (2020). A scoping review of feed interventions and livelihoods of small-scale livestock keepers. Nature Plants, 6(10), 1242–1249. https://doi.org/10.1038/s41477-020-00786-w

Hopker, A., Pandey, N., Bartholomew, R., Blanton, A., Hopker, S., Dhamorikar, A., Goswami, J., Marsland, R., Metha, P., & Sargison, N. (2021). Livestock vaccination programme participation among smallholder farmers on the outskirts of National Parks and Tiger Reserves in the Indian states of Madhya Pradesh and Assam. PLOS ONE, 16(8), e0256684. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256684

Henderson, B., Dizyee, K., & Ash, A. (2017). Assessing the sustainable development and intensification potential of beef cattle production in Sumbawa, Indonesia, using a system dynamics approach. PLOS ONE, 12(8), e0183365. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183365

Badan Pusat Statistik. (2024, 1 Juli). Persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. BPS.go.id. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html

Kukarpaper. (2026, 10 Januari). Kukar perkuat posisi sebagai lumbung pangan penyangga IKN Nusantara. Kukarpaper.com. Diakses dari https://www.kukarpaper.com

Kutairaya. (2026, 5 Februari). Distribusi bantuan ternak di Kukar dinilai belum merata antarkecamatan. Kutairaya.id. Diakses dari https://www.kutairaya.id